

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun program pengendalian penduduk di Kampung KB tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Dimana didalamnya diatur mengenai tugas dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Di dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Hasil analisa indikator kinerja pada lima tahun sebelumnya dan analisa permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta tinjauan terhadap indikator kinerja BKKBN serta indikator kinerja BPPM DIY yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, diambil Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				20	21	22	23	24	25
1.	Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah angka dalam keluarga	2	2	2	2	2	2

Sumber : Renstra 2017-2022 (2019)

Di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pada BAB IV terkait masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk hal ini terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Menysasar pada persoalan kepadatan penduduknya, dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran. Jika melihat pada persentase migrasi keluar-masuk penduduk Kota Yogyakarta dimana migrasi masuk lebih tinggi dibanding migrasi keluar (pertumbuhan rata-rata sebesar 34,61 persen per tahun). Hal ini menunjukkan bahwa program KB tidak bisa dilihat secara parsial, namun merupakan program yang melayani semua penduduk yang bedomisili di Kota Yogyakarta terlepas dari status KTP penduduk.

Sehingga penelitian ini ingin melihat apakah peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta melalui program Kampung KB sudah sesuai dengan Perwal Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dalam pembahasan menggunakan teori peran dari Rizzo dengan empat kategori yang digunakan untuk menjadi panduan dalam melihat peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta melalui program Kampung KB. Hasil dari temuan di lapangan selama proses penelitian ini akan dipadukan dengan empat kategori peran yang di jelaskan oleh Rizzo.

3.1 Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan, didalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang mampu berubah struktur sosial dalam masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam membimbing seseorang dalam kemasyarakatan. Peran dilakukan dengan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam kedudukan sosial, di dalam pekerjaan dan juga di dalam peranan-peranan yang lain.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tentunya tidak lepas dari beberapa program yang dibuat. Program-program yang ada tentunya berhubungan dengan

tugas yang dimiliki dinas yaitu dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran, kematian, maupun imigrasi. Kemudian dibentuknya Kampung KB menjadi salah satu program Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di samping untuk mensejahterakan warga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara kepada Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai pemegang kekuasaan, peran yang dimiliki dinas sangat erat kaitannya dengan program-program yang telah direncanakan. Peran dinas pada Kampung KB yaitu sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Dinas juga mempunyai peran dalam menggandeng pihak dari sektor lain agar program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Herristanti mengatakan bahwa :

“Jadi kebetulan kita mau melakukan monev di empat belas Kampung KB, untuk saya katakan efektif tidaknya belum bisa mengukur juga karena itu juga baru kita monev, dari hasil baru bisa kita bandingkan antara data-data sebelum Kampung KB terbentuk dengan yang sudah ada.”

Berikut gambaran dinas dalam melakukan monitoring dan kerjasama dengan sektor lain yaitu :



Gambar 3.1 Monev RW 12 Kelurahan Prawirodirjan

Sumber : Observasi tahun 2019



Gambar 3.2 Lorong Sayur dari Dinas Pertanian

Sumber : Observasi tahun 2019

Pada hasil wawancara dan gambar diatas sudah dijelaskan serta digambarkan mengenai peran dinas yang dilakukan pada Kampung KB RW 12

Kelurahan Prawirodirjan. Menurut analisa penulis kaitannya dengan teori, peran dinas disetiap kegiatan-kegiatan Kampung KB telah berkontribusi dengan baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta peran dalam menggandeng pihak dari sektor lain. Hal ini terlihat dengan adanya kontribusi langsung dari Dinas Pertanian dengan membuat lorong sayur di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan sebagai salah satu bentuk kerjasama Dinas Pertanian dengan program Kampung KB.

Peran yang dimiliki dinas juga erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat RW 12 Kelurahan Prawirodirjan dengan mengikutsertakan masyarakat di setiap program kegiatan yang akan dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan di Kampung KB merupakan salah satu keberhasilan peran dinas dalam menggandeng masyarakat untuk ikut serta di setiap kegiatan Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Pernyataan dari Martini selaku ketua UPPKS memberikan pendapat mengenai peran dinas di Kampung KB RW 12 :

“Ya dia selalu membantu, selalu memantau. Masalahnya kalau ada apa-apa juga dari ini juga PLKB nya terjun, bagus dari PLKB juga.”

Pendapat yang sama dikatakan oleh Eni sebagai Ketua RT 39 yang aktif mengikuti setiap kegiatan di Kampung KB, yaitu :

“Mesti ada, kalau pertemuan itu sebulan itu ada dua atau tiga kali. Mesti ada narasumber dari puskesmas, dinas kesehatan, dinas dalduk, dari UMY Ibu Lilis.”

Hal senada juga di tuturkan oleh Sri Subiyanti, selaku sekretaris RW 12, bahwa :

“Itu aktif, dia sering sekali memberi penyuluhan membimbing jalannya kampung kb. Mesti ada.”

Berikut gambaran partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kampung KB yaitu :



Gambar 3.3 Pembuatan Syrup Seruni

Sumber : Observasi tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Dinas yang dirasakan masyarakat sejauh ini sudah sangat bagus, masyarakat merasakan secara langsung peran dari Dinas di setiap kegiatan yang ada di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan. Kegiatan-kegiatan yang ada tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat juga peran Dinas sebagai narasumber maupun sebagai pembina Kampung KB. Selain melihat fungsi dan perannya, salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan peran dinas apakah mereka berhasil atau tidak yaitu dengan hasil kerja dalam menjalankan tugas sebagai pembina Kampung KB. Tidak

terkecuali dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Yogyakarta Dinas memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan. Terdapat empat indikator yang dapat mengukur peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta melalui program Kampung KB, yaitu :

3.3.1 Wewenang Dinas dalam Program Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan

Dalam pasal 4 Perwal Nomor 65 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

6. Pelaksanaan pengawasan. Pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi belum terdapat wewenang yang mengatur pada pelaksanaan tugas yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki dinas, maka dinas memiliki hak dalam menjalankan program pemerintah daerah yaitu program Kampung KB sebagai program Pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Pernyataan dari Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diwawancarai. Pada 24 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Kalau wewenangnya tentu saja kita sebagai pembina Kampung KB memberikan pedoman kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi. Jika dulu monev dari pengurus kampung kb kita undang, akan tetapi kalau ini kita datang kesana supaya benar-benar tahu kondisi yang sebenarnya.”

Dari hasil wawancara di atas wewenang yang dimiliki dinas di setiap kegiatan Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan yaitu sebagai pembina Kampung KB, dan pelaksana monitoring dan evaluasi. Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dinas pada Kampung KB yang telah tersebar di Kota Yogyakarta pada awalnya dinas mengundang para pengurus Kampung KB untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta akan tetapi sekarang Dinas datang secara langsung ke Kampung KB. Berikut contoh pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan :



Gambar 3.4 Monev Rumah Data

Sumber : Observasi tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dan gambar diatas bahwa di dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung diharapkan Dinas dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi pengurus Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan di setiap kegiatan. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mencari alternatif pemecahan permasalahan.

Kekuasaan yang dimiliki Dinas sebagai pembina Kampung KB hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang ada di Kampung KB berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang produktif, sehingga mampu menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pernyataan dari Utami Wulandari selaku Kepala Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, yang diwawancarai. Pada 15 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Mereka selalu memberikan pembinaan di setiap kegiatan Kampung KB”

Salah satu contoh wewenang Dinas dalam melakukan pembinaan di setiap kegiatan kampung KB khususnya di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan dalam kegiatan pelatihan zuppa sup UPPKS Kencana Boga Seperti gambar di bawah ini :



Gambar 3.5 Pembinaan Pelatihan Zuppa Soup

Sumber : Observasi Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas pembinaan yang dilakukan Dinas sudah berjalan dengan baik karena Dinas dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan perencanaan yang dibuat. Hal ini juga dapat terlihat tugas Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program Kampung KB. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki dinas sebagai pembina Kampung KB hal

ini akan lebih efektif dilakukan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang ada di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

3.3.2 Tanggung Jawab Dinas pada Kegiatan Kampung KB R 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah unsur pendukung tugas Walikota Yogyakarta yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2018, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

No	Uraian	Indikator	Target Indikator Kinerja Setiap Tahun						Realisasi Indikator Kinerja Setiap Tahun						Tercapai / Tidak Tercapai
			Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Sasaran Strategis: Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	2	2	2	2	2	1,25	1,24	0	0	0	0	Tercapai
2	Program :														
	1 Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	8,77 CBR	8,84 CBR	0	0	0	0	Tercapai
	2 Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,86%	70,18%	70,30%	70,50%	70,80%	71%	70,18%	68,19%	0	0	0	0	Tidak Tercapai
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,40%	13%	12,75%	12,50%	12,25%	12%	13,74%	15,13%	0	0	0	0	Tidak Tercapai
		Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27,15%	27,80%	28,77%	29,74%	30,71%	31,69%	28,91%	25,93%	0	0	0	0	Tidak Tercapai

Gambar 3.6 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017-2018

Sumber : LKIP Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta Tahun (2018)

Pada Gambar diatas dapat dilihat dari kelima indikator kinerja Dinas terdapat dua indikator yang telah tercapai realisasinya yaitu rata-rata jumlah anak dalam keluarga dan CBR (*Crude Birth Rate*). Akan tetapi masih terdapat tiga indikator yang tidak tercapai pada program keluarga berencana dan pembangunan keluarga yaitu CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), *unmeet need*, dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga.

Pada indikator Kelompok Kegiatan Bina Keluarga, hal ini disebabkan pada sumber daya manusia yang dimiliki Dinas tidak sebanding dengan jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga sehingga Dinas belum mempunyai strategi pada permasalahan ini. Sehingga realisasi pada indikator Kelompok Kegiatan Bina Keluarga tidak tercapai. Kemudian masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga serta permasalahan pada pergantian kader baru yang belum dapat menjalankan kegiatan secara optimal.

Kemudian pada indikator CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) dan *unmeet need* masih terdapat data anomali dimana jumlah CPR rendah akan tetapi jumlah *unmeet need* tinggi. Hal ini juga disebabkan karena peran Dinas dalam membina kegiatan indikator belum secara maksimal. Kemudian dilihat dari partisipasi masyarakat masih kurang optimal karena masyarakat tidak menggunakan metode kontrasepsi modern maupun terdapat alasan fertitas. Pada indikator *unmeet need* ini juga masih terdapat masyarakat yang enggan mengatakan telah menggunakan alat kontrasepsi, hal ini dikarenakan alasan budaya sosial.

Pernyataan dari Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diwawancarai. Pada 24 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Jadi pendekatan kita mungkin lebih kepada selain juga KIE tentang efek samping pengenalan alat-alat kontrasepsi itu juga dilakukan, yang tidak kalah pentingnya lagi juga sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.”

Berikut gambaran tanggung jawab dalam pembinaan kegiatan bina keluarga pada remaja di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, yaitu :



Gambar 3.7 Pertemuan PIK- R Garuda di Taman Teletubis

Sumber : Rumah Data Kampung KB

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, pada kegiatan bina keluarga memang belum tercapai realisasinya akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab Dinas dengan hak yang dimiliki Dinas sebagai Pembina Kampung KB maka Dinas melaksanakan Kegiatan PIK-R di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan juga sebagai salah satu kegiatan Kampung KB. Tanggung jawab tugas yang dimiliki Dinas belum sepenuhnya tercapai dengan baik, akan tetapi dengan ini Dinas sudah bisa merealisasikan tanggung jawabnya sebagai bentuk

pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2018.

3.3.3 Kejelasan Tujuan Indikator Kinerja Program Dinas

Kejelasan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian misi keempat Pemerintah Kota Yogyakarta melalui strategi daerah yang telah ditetapkan perlu didukung dengan hasil pengukuran indikator kinerja program kegiatan Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta. Pada pertengahan tahun 2018, dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2017 maka dinas melakukan review terhadap target indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja serta hasil review Renstra tersebut, yang di tuangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 maka kejelasan tujuan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

No.	Program	Murni					Review					
1	Pengendalian Penduduk	CBR = Crude Birth Ratio					CBR = Crude Birth Rate					
2	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Indikator Program	Target					Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.72%	73.77%	73.83%	73.94%	74.00%	70.18%	70.39%	70.59%	70.80%	71.00%
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11.34%	11.28%	11.22%	11.16%	11.10%	13.00%	12.75%	12.50%	12.25%	12.00%
	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	28.28%	29.70%	31.12%	32.54%	33.96%	27.80%	28.77%	29.74%	30.71%	31.69%	

Gambar 3.8 Review Renstra

Sumber : LKIP Dinas Tahun 2018

Dilihat dari gambar di atas maka kejelasan tugas yang dimiliki Dinas yaitu pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua program tersebut memiliki kejelasan tujuan yang jelas dengan tugas yang dimiliki Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB pada program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kejelasan tujuan pada program yang dimiliki Dinas menjadi wewenang dan tanggung jawab dinas dalam menjalankan program tersebut dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas dalam mendukung pencapaian kinerja utama Dinas didukung dengan pelaksanaan program kegiatan dengan masing-masing indikator program pada gambar di atas adalah :

1. Program Pengendalian Penduduk Indikator kinerja : CBR (Crude Birth Rate). CBR atau Angka Kelahiran Kasar menggambarkan jumlah kelahiran yang terjadi dalam 1 tahun per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, Dinas Dalduk dan KB menetapkan target mempertahankan Angka Kelahiran Kasar 10 –11 CBR atau mempertahankan angka kelahiran 10 –11 kelahiran bayi per 1000 penduduk.
2. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pada Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditetapkan 3 indikator kinerja, yaitu :
 - a. Meningkatkan angka CPR (Contraceptive Prevalence Rate). Yang dimaksud angka CPR adalah angka/jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan kontrasepsi modern (IUD, Implan, MOP, MOW, Pil, Suntik dan Kondom). Di tahun 2018, Dinas Dalduk dan

KB menetapkan target 70,18% CPR atau dari jumlah total PUS yang ada ditargetkan 70,18% adalah pengguna/pemakai kontrasepsi modern;

- b. Menurunkan angka unmetneed atau menurunkan jumlah PUS yang tidak/belum menggunakan kontrasepsi modern. Di tahun 2018, Dinas Dalduk dan KB menargetkan penurunan jumlah unmetneed menjadi 13%; dan
- c. Meningkatkan persentase jumlah kelompok kegiatan bina keluarga (Bina Keluarga Sejahtera dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang berbasis RW menjadi 27,80% pada tahun 2018. Penetapan indikator kinerja ini sejalan dengan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bahwa pembangunan manusia dimulai dari pembangunan dan ketahanan keluarga.

Kejelasan tujuan kegiatan dinas di setiap indikator program diatas menunjukkan bahwa dinas mempunyai tujuan yang sama dengan tugas yang dimiliki yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kejelasan tujuan ini menjadi tanggung jawab dinas di dalam merealisasikan seluruh program dengan harapan dapat meningkatkan kesertaan KB masyarakat serta dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta melalui program Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Menurut pernyataan dari Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang penulis wawancarai pada 05 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Bicara tentang Kampung KB mungkin program ini baru dicanangkan tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 baru satu Kampung KB yang di danai dari dana alokasi khusus. Keberhasilan program sendiri belum bisa di ukur dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian tahun 2018 kesana demi sedikit ada hasilnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas penulis menyampaikan bahwa, sejauh ini kejelasan tujuan yang hendak dicapai Dinas telah mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan program Kampung KB oleh Dinas pada tahun 2016 memang baru dicanangkan belum terlihat nilai keberhasilan program pada tahun pertama. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 kejelasan tujuan Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta telah mempunyai pencapaian kinerja seperti yang telah dijelaskan sebagaimana penjelasan diatas. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dengan tugas yang dimiliki Dinas pada program Kampung KB memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari baru dicanangkannya program ini pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 baru dapat terlihat kejelasan tujuan pada program Kampung KB ini.

3.3.4 Cakupan Pekerjaan Dinas dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Sebagai bentuk tanggung jawab Dinas dalam menjalankan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan hak yang dimiliki Dinas sebagai pembina Kampung KB sebagai koordinator dan fasilitator. Cakupan pekerjaan pada program Kampung KB diperluas sebagai

realisasi dari program yang dicanangkan BKKBN. Perluasan cakupan pekerjaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta diharapkan program kerja yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik dan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat. Program Kampung KB diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan kependudukan salah satu masalah yang harus diatasi yaitu menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, program Kampung KB diharapkan dapat memberikan pemahaman mengatur jarak kelahiran, dan mengurangi pernikahan dini.

Cakupan pekerjaan yang dibuat oleh Dinas jika disangkutpautkan dengan peran Dinas terhadap pengendalian penduduk di Kota Yogyakarta ini dapat disampaikan bahwa melalui sasaran strategis dan indikator program kerja Dinas sudah cukup mumpuni dikarenakan cakupan pekerjaan ini telah mencakup 14 Kampung KB yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu cakupan lintas sektoral juga dilakukan dalam membantu urusan kependudukan dan KB seperti dalam pemberdayaan ekonomi Dinas dapat bersinergi dengan Dinas Pertanian, Dinas sosial. Kemudian sinergi dengan lintas sektor dilakukan di 14 Kampung Kb yang diharapkan dengan perluasan cakupan ini program Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta dapat terealisasi dan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Salah satu contoh lintas sektoral yang dilakukan Dinas dengan Dinas Kesehatan dan Komando Rayon Militer yaitu pembenahan sanitasi rumah warga di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan. Seperti gambar di bawah ini :



Gambar 3.9 Pembenan Sanitasi

Sumber : Rumah Data Kampung KB



Gambar 3.10 Penyerahan Sanitasi

Sumber : Rumah Data Kampung KB

Melihat hal ini maka memang cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas telah diperluas sehingga indikator program yang ada dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Namun memang belum sepenuhnya cakupan yang

dimiliki Dinas terasa oleh 14 Kampung KB yang ada dikarenakan setiap Kampung KB mempunyai kriteria masalah yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu bentuk peran Dinas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pembina Kampung KB. cakupan pekerjaan yang telah terlaksana dengan beberapa lintas sektoral menjadi kejelasan tujuan yang hendak dicapai di dalam mensejahterakan kehidupan warga atau masyarakat.

3.2 Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Tugas yang dimiliki Dinas dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya pemerataan penduduk di suatu wilayah pada perubahan populasi yang disebabkan oleh tiga indikator yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam Bab IV RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2017-2022, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta salah satunya masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk. Hal ini terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta jika menyoal pada persoalan kepadatan penduduknya, dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran.

Sebagai bentuk tanggung jawab tugas yang dimiliki Dinas maka di dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Melihat hal ini maka pengendalian pertumbuhan penduduk melalui tiga indikator, yaitu :

3.2.1 Kelahiran

Indikator tugas utama atau sasaran strategis Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta adalah rata-rata jumlah anak dalam keluarga dua. Pengendalian angka kelahiran melalui metode kontrasepsi modern dapat dilakukan melalui IUD, Implan, MOP, MOW, Pil, Suntik, dan Kondom. Kemudian menurunkan angka *unmeet need* atau menurunkan jumlah pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak kembali dan menginginkan anak tunda yang belum menggunakan metode kontrasepsi modern.

Melalui program Kampung KB diharapkan sasaran strategis kelahiran penduduk dapat terkendali melalui program-program yang ada. Hal ini menjadi tanggung jawab tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Herristanti, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menuturkan bahwa :

“Sebenarnya kalau secara langsung berkaitan dengan pertumbuhan penduduk di Yogyakarta itu dapat dikatakan terdapat data yang anomali. Data anomali itu artinya kalau dilihat dari rata-rata jumlah anak, anak yang dimiliki dalam satu keluarga itu kalau tidak salah 1, 2, 3 artinya dua anak saja tidak ada jika di rata-rata.”

Pendapat yang sama dikatakan oleh Yeni selaku petugas KB puskesmas Kecamatan Gondomanan, yang memiliki pendapat jika program KB secara efektif berjalan maka dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk, yaitu :

“Kalau program kampung kb berjalan dengan bagus peserta kb nya banyak dapat seperti itu, akan tetapi kasus unmeet need nya masih tinggi.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas sudah dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga satu maupun dua anak. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran sudah dapat dikendalikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam program Kampung KB. Kejelasan tujuan yang dimiliki Dinas dalam mengendalikan penduduk dan keluarga berencana masih menjadi tanggung jawab yang berat mengingat kelahiran bayi pertahun dapat meningkat pada waktu yang tertentu. Kemudian pada perubahan angka unmetneed yang tidak menentu dapat ikut mempengaruhi angka kelahiran yang tinggi pula. Hal ini dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) pada penggunaan alat kontrasepsi modern. Dilihat dari hambatan yang dirasakan masih banyak pasangan usia subur yang memilih untuk tidak kb walaupun mereka sudah tidak menginginkan anak lagi maupun menginginkan anak tunda.

Pernyataan dari Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diwawancarai. Pada 05 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Jika dilihat dari trend nya jumlah PUS itu makin lama juga makin mengalami penurunan. Kita sendiri juga heran, penduduk remajanya besar tapi ketika kemudian itu menjadi pus jumlah nya malah menurun. Kalau misalnya jumlah pusnya itu turun artinya itu kan sebenarnya yang dari remaja migrasi keluar bekerja keluar kota kemudian mungkin punya anak disana punya keluarga disana kemudian menjadi penduduk kota lagi.”

Hal ini dapat dilihat dari data KB Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan yaitu :

Tabel 3.2 Data KB Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan

TH N	PUS	IUD		MOW		MOP		IMPULAN		SUNTIK		PIL		CO		JML Pesert
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S			
2016	77	11	1	3	1	0	0	0	0	2	15	3	4	0	4	44
2017	84	15	0	5	0	0	0	1	0	17	0	4	0	6	0	48
2018	73	11	2	4	2	0	0	1	0	52	1	3	4	0	5	49

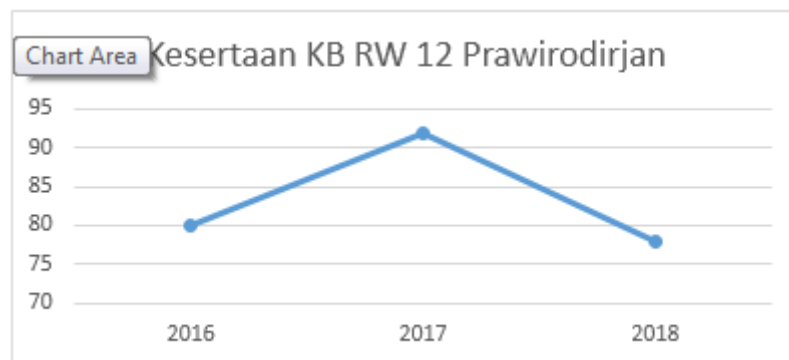
H	IAS	IAT	TIAL	Unmetneed
1	15	4	13	22,0779
1	17	5	13	21,4286
2	14	3	6	12,3288

Sumber : diolah oleh penulis 2019

Dari hasil observasi data diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pasangan usia subur pada tahun 2016 masih tinggi yaitu 22,0779 dengan pasangan usia subur 77 orang. Kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 21,4286 dengan jumlah pasangan usia subur 84 orang. Jika dilihat dari tahun 2016 jumlah unmetneed tinggi akan tetapi jumlah PUS lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah unmetneed mengalami penurunan yaitu 12,3288 dengan jumlah PUS 73 orang. Jumlah unmetneed tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan unmetneed akan tetapi jumlah PUS mengalami kenaikan hanya pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angka kelahiran di Kelurahan Prawirodirjan mengalami penurunan dan telah berhasil menekan tingkat kelahiran melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Peningkatan partisipasi KB banyak didukung oleh peran wanita dalam penggunaan alat kontrasepsi tercatat tingkat kesertaan KB RW 12 Kelurahan

Prawirodirjan adalah 2,5 persen. Kontribusi wanita dalam menggunakan alat atau metode kontrasepsi dapat mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka kesertaan KB maka dapat dikatakan semakin tinggi pula penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini dapat dilihat dari data kesertaan Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan yaitu :



Gambar 3.11 Kesertaan KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan

Sumber : Rumah Data Kampung KB

Dari hasil gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 12 Kelurahan Prawirodirjan pada tahun 2016 diresmikan menjadi Kampung KB tingkat kesertaan KB 80 orang dalam setahun. Kemudian pada tahun 2017 tingkat kesertaan masyarakat mengalami peningkatan dengan jumlah peserta 92 orang. Akan tetapi pada tahun 2018 jumlah kesertaan masyarakat KB menurun menjadi 78 orang. Jika tingkat kesetaraan masyarakat dalam menggunakan alat atau metode kontrasepsi semakin meningkat maka hal ini secara tidak langsung dapat mengendalikan angka kelahiran sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk dapat teratasi.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan wanita yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem reproduksi, sehingga dapat memutuskan mengatur dan mencegah kelahiran. Kemudian pada usia PUS dimana akan semakin kecil atau menurun resiko seseorang terhadap kemampuan untuk hamil dan jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun dibandingkan dengan jumlah PUS sangatlah sedikit.

Permasalahan ini menjadi penting mengingat peran Dinas dalam pengendalian penduduk sebagai pembina Kampung KB belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa indikator program yang mengalami penurunan sehingga beberapa kegiatan yang ada di Kampung KB masih belum terlaksana dengan baik. Apabila melihat data unmeet need dengan kesertaan KB di Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan memang mengalami perubahan yang signifikan akan tetapi dalam hal ini peran dinas dalam menjalankan tugasnya masih perlu ditingkatkan agar mendapat hasil yang maksimal.

3.2.2 Kematian

Tingkat kesehatan masyarakat menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama angka kematian bayi dan secara jangka panjang akan meningkatkan angka harapan hidup. Kebijakan penurunan angka kematian diwujudkan dengan penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan serta penurunan angka kematian bayi dan anak.

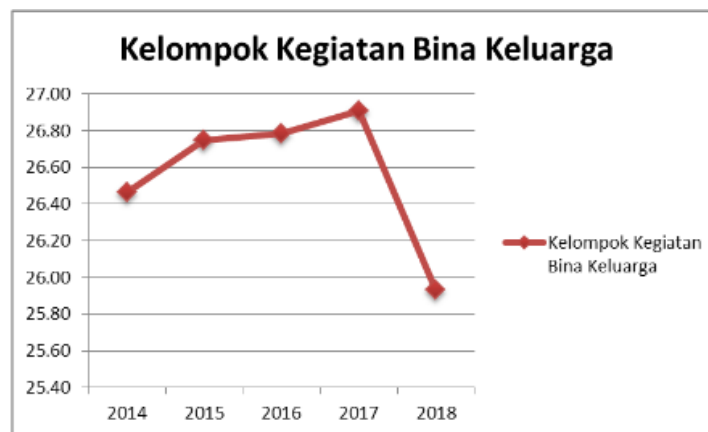
Menurut Undang-undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 19 ayat 2 menjelaskan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui :

- a) Pengendalian kelahiran;
- b) Penurunan angka kematian;
- c) Pengarahan mobilitas penduduk.

Tanggung jawab yang dimiliki dinas bukan hanya pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, akan tetapi pada permasalahan kematian ibu dan anak. Kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Angka kematian yang tidak sebanding dengan angka kelahiran dan tingginya angka kelahiran dari setiap ibu dengan memiliki anak rata-rata dua anak. Hal ini yang dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta tidak dapat di kendalikan sehingga menyebabkan kematian yang sangat perlu diwaspadai karena berhubungan dengan angka kematian ibu hamil atau melahirkan. Usaha yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, salah satu solusinya adalah penggunaan alat kontrasepsi. Diharapkan dengan pemakaian alat kontrasepsi ini dapat mencapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dibentuknya program Kampung KB menjadi salah satu upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program pengendalian kelahiran juga di dalamnya terdapat kelompok kegiatan bina keluarga. Kegiatan ini

bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dimana dilakukan pembinaan terhadap balita dan anak, pembinaan terhadap remaja, serta pembinaan terhadap lansia. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat mengendalikan angka kelahiran juga kematian pada ibu hamil atau melahirkan sehingga terwujud pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga kecil bahagia sejahtera. Berikut grafik persentase kelompok kegiatan bina keluarga :



Gambar 3.12 Grafik Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga per Tahun

Sumber : LKIP Dinas Tahun 2018

Dari gambar grafik diatas diketahui kelompok kegiatan bina keluarga meskipun pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2018 menurun sangat drastis. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang dimiliki dinas tidak sebanding dengan jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga. Tanggung jawab yang dimiliki Dinas pada permasalahan ini yaitu dengan mencari jalan keluar maupun strategi sehingga kelompok kegiatan bina

keluarga dapat berjalan. Sehingga angka kematian dapat berkurang melalui pembekalan edukasi kepada masyarakat.

Menurut pernyataan Sudaryati selaku Petuga Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang penulis wawancarai di Kantor Kecamatan Gondomanan.

Pada 15 Juli 2019, mengatakan bahwa :

“Kematian bayi dan ibu melahirkan iya. Tapi disana tidak terjadi ibu meninggalkan karena melahirkan, remaja menikah dini tidak ada.”

Hal senada juga dituturkan oleh Yeni selaku petugas KB puskesmas Kecamatan Gondomanan, bahwa :

“Kalau program nya berjalan ya tentu bisa.”

Berikut terdapat tabel hasil rekapitulasi kematian per Kecamatan Kota Yogyakarta serta hasil rekapitulasi per Kelurahan Kecamatan Gondomanan, yaitu :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Mutasi Kematian per Kecamatan Kota Yogyakarta Tanggal 31 Des 2016-31 Des 2018

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	293	263	556
Jetis	240	211	451
Gondokusuman	300	336	636
Danurejan	188	174	362
Gedongtengen	185	192	377
Ngampilan	177	176	353
Wirobrajan	241	221	462
Mantrijeron	311	292	603
Kraton	200	183	383
Gondomanan	131	138	269
Pakualaman	90	121	211
Mergangsan	255	263	518
Umbulharjo	539	461	1000
Kotagede	223	212	435
Total	3373	3243	6616

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019

Tabel 3.4 Rekapitulasi Mutasi Kematian per Kelurahan Kecamatan Gondomanan Tanggal 31 Des 2016-31 Des 2018

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ngupasan	51	51	102
Prawirodirjan	80	87	167
Total	131	138	269

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas data tabel menjelaskan bahwa angka kematian dapat dikendalikan melalui penggunaan alat kontrasepsi dan juga kegiatan kelompok bina keluarga. Sehingga kematian pada ibu hamil atau melahirkan tidak terjadi dan pertumbuhan penduduk dapat terkendali melalui pengendalian kelahiran dan pencegahan kematian. Akan tetapi dilihat dari hasil rekapitulasi mutasi kematian dari tahun 2016-2018 Kelurahan Prawirodirjan memiliki jumlah 167 orang dengan jumlah yang masih terbilang banyak. Sementara angka kematian juga sulit untuk diprediksi karena banyak sedikitnya kasus kematian akan sangat bergantung pada derajat kesehatan masyarakat, ada tidaknya wabah penyakit dan faktor bencana alam.

3.2.3 Migrasi (Masuk dan Keluar)

Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta bukan hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, namun juga terjadi karena migrasi masuk dan keluar. Dikenal sebagai kota wisata, kota budaya dan kota pelajar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadu nasib untuk mencari kerja maupun untuk sekolah. Hal ini kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk cenderung fluktuatif. Artinya, jumlah

penduduk di suatu waktu berkurang atau minus, tetapi di waktu lain mengalami penambahan penduduk.

Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta bukan hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, namun juga terjadi karena migrasi masuk dan keluar. Dikenal sebagai kota wisata, kota budaya dan kota pelajar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadu nasib untuk mencari kerja maupun untuk sekolah. Hal ini kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk cenderung fluktuatif. Artinya, jumlah penduduk di suatu waktu berkurang atau minus, tetapi di waktu lain mengalami penambahan penduduk.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena migrasi masuk maupun keluar bukanlah pekerjaan yang mudah untuk diminimalisir juga diatur. Menyangkut dengan hak seseorang untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Sepanjang memenuhi persyaratan untuk pindah dan daerah yang akan ditempati memungkinkan untuk itu, maka pemerintah daerah tidak dapat menolak penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang akan pindah/pergi (migrasi keluar). Berikut penuturan Herristanti selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang diwawancarai pada 20 Agustus 2019, mengatakan bahwa :

“Iya hanya istilah nya hanya mendata saja, tidak bisa kemudian melarang terjadinya migrasi penduduk. Ada yang mau masuk kita tidak bisa melarang, asal syarat-syarat nya lengkap kita tidak bisa melarang. Tidak ada kemudian diatur harus seperti ini harus seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tingginya arus migrasi yang terjadi di Kota Yogyakarta tidak dapat diminimalisir dan diatur karena tanggung jawab Dinas hanya pada tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta tidak mempunyai hak untuk melarang penduduk datang dan pergi. Derasnya arus migrasi masuk dan keluar jelas akan menambah beban jumlah penduduk yang berlebihan sehingga mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga membuat lahan kumuh karena harus menampung tambahan manusia secara berlebihan.

Perpindahan penduduk ke kota-kota besar merupakan suatu fenomena sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kenyataan inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan migrasi antar kota maupun antar provinsi yang dianggap memberikan harapan pendapatan yang lebih baik. Herristanti mengutarakan mengenai perpindahan masyarakat antar Kabupaten atau Kota.

“Kadang kalau di kota Yogyakarta sudah tidak mampu karena harga tanah sudah sangat mahal. Kemudian mereka pindah ke daerah sekitar Jogja, daerah Bantul, Kulon Progo, Sleman pun kadang harga tanah sudah mahal.”

Berikut rekapitulasi mutasi migrasi masuk dan keluar per Kelurahan Prawirodirjan yaitu :

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Mutasi Pindah per Kelurahan Kota Yogyakarta
Tanggal 31 Des 2016-31 Des 2018**

Pindah	Ngupasan		Jumlah	Prawirodirjan		Jumlah
	L	P		L	P	
Dalam satu Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	0
Antar Desa/Kelurahan	7	6	13	1	3	4
Antar Kecamatan	25	35	60	53	58	111
Antar Kab/Kota	45	64	109	77	105	182
Antar Provinsi	56	61	117	91	75	166

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Yogyakarta Tahun (2019)

**Tabel 3.6 Rekapitulasi Mutasi Kedatangan per Kelurahan Kota Yogyakarta
Tanggal 31 Des 2016-31 Des 2018**

Pindah	Ngupasan		Jumlah	Prawirodirjan		Jumlah
	L	P		L	P	
Dalam satu Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	0
Antar Desa/Kelurahan	2	4	6	4	4	8
Antar Kecamatan	23	24	47	28	59	87
Antar Kab/Kota	29	42	71	70	72	142
Antar Provinsi	74	70	144	98	114	212

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas masyarakat Kelurahan Prawirodirjan melakukan migrasi masuk dan keluar terbanyak yaitu antar kota maupun antar provinsi. Berdasarkan data rekapitulasi migrasi di atas masyarakat Kelurahan Prawirodirjan menunjukkan bahwa aktivitas migrasi masuk lebih besar dan tidak sebanding dengan banyaknya migrasi keluar. Hal ini membuat jumlah penduduk khususnya penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Kemudian hal ini membuktikan jika masyarakat mengincar kota-kota besar dengan memiliki peluang keterserapan dunia kerja yang tinggi, dan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Migrasi sebenarnya merupakan suatu fenomena sosial yang normal dan biasa terjadi. Namun permasalahan timbul apabila migrasi tidak terkendali dan menimbulkan dampak sosial bagi suatu daerah sehingga mempengaruhi pembangunan masyarakat dalam suatu wilayah serta berbagai rentetan resiko yang ada di dalam aktivitas migrasi.